



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI  
DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

*Handwritten signature*

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Kampung, adalah paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

*Handwritten mark*

2. Dana Desa yang selanjutnya disebut Dana Kampung, adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung.
3. Desa yang selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kapitalaung atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
5. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
6. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
8. Dinas adalah bagian Kantor Pemerintah yang mengurus pekerjaan tertentu.
9. Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah dana yang dialokasikan Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Kampung paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi.
10. Jumlah Kampung adalah Jumlah Kampung yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
12. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Kampung yang dibagi secara merata kepada setiap Kampung berdasarkan klaster jumlah penduduk.
13. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Kampung, angka kemiskinan Kampung, luas wilayah Kampung, dan tingkat kesulitan geografis Kampung.

Pa

14. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Kampung yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKK adalah Rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada bank yang ditetapkan.
17. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut Kepala KPPN adalah Kepala KPPN Tahuna.
18. Bantuan Langsung Tunai Kampung selanjutnya disingkat BLT Kampung adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Kampung yang bersumber dari Dana Kampung untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019*.
19. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
20. *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat SDG's adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran Global tahun 2016 sampai tahun 2030.
21. *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* yang selanjutnya disingkat OMSPAM adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring Transaksi dalam sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan yang diakses melalui jaringan yang berbasis *web*.
22. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas Nasional.

De,

BAB II  
PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG

Pasal 2

Rincian Dana Kampung setiap Kampung tahun anggaran 2022 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Alokasi Dana Kampung, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Kinerja; dan
- c. Alokasi Formula.

Pasal 3

Rincian Dana Kampung setiap tahun anggaran 2022 yang bersumber dari anggaran Alokasi Dana Kampung, dialokasikan secara merata dan berkeadilan untuk pembiayaan :

- a. penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Kampung;
- b. penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Kampung;
- c. operasional Pemerintah Kampung;
- d. tunjangan majelis tua-tua Kampung; dan
- e. operasional lembaga kemasyarakatan Kampung.

Pasal 4

- (1) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, Pagu Alokasi Dasar dihitung sebesar 65% (enam puluh lima perseratus) dari anggaran Dana Kampung secara proposional dibagi kepada setiap Kampung berdasarkan klaster jumlah penduduk.
- (2) Alokasi Dasar setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan :
  - a. Rp.415,978,000,00 (empat ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) bagi Kampung dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
  - b. Rp.478,334,000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta, tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) bagi Kampung dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 500 (lima ratus) jiwa;
  - c. Rp.504,725,000,00 (lima ratus empat juta, tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) bagi Kampung dengan jumlah penduduk 501 (lima ratus satu) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) jiwa;

*Pa,*

- d. Rp.603,117,000,00 (enam ratus tiga juta seratus tujuh belas ribu rupiah) bagi Kampung dengan jumlah penduduk 1.501 (seribu lima ratus satu sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa;
- e. Rp.665.508,000,000 (enam ratus enam puluh lima juta, lima ratus delapan ribu rupiah) bagi Kampung dengan jumlah penduduk 3.001 (tiga ribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
- f. Rp.727,900,000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) bagi Kampung dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10,000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
- g. Rp.790,291,000,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) bagi Kampung dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

#### Pasal 5

Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dibagi kepada Kampung-Kampung dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Kampung, pengelolaan Dana Kampung, capaian keluaran (*output*) Dana Kampung, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan Kampung.

#### Pasal 6

Penghitungan Alokasi Kinerja setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut :

- a. pengelolaan keuangan Kampung dengan bobot 20% (dua puluh perseratus);
- b. pengelolaan Dana Kampung dengan bobot 20% (dua puluh perseratus);
- c. capaian keluaran (*output*) Dana Kampung dengan bobot 25% (dua puluh lima perseratus); dan
- d. capaian hasil (*outcome*) pembangunan Kampung dengan bobot 35% (tiga puluh lima perseratus).

#### Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio pendapatan asli Daerah Kampung terhadap total pendapatan APBKampung dengan bobot 50% (lima puluh perseratus).
- (2) Pengelolaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dinilai dari :
  - a. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Kampung terhadap total Dana Kampung dengan bobot 55% (lima puluh lima perseratus);

PA,

- b. presentasi pengadaan barang jasa Dana Kampung secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima perseratus).
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dinilai dari :
- a. persentase realisasi anggaran Dana Kampung dengan bobot 50% (lima puluh perseratus);
  - b. persentasi capaian keluaran Dana Kampung dengan bobot 50% (lima puluh perseratus).
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dinilai dari :
- a. perubahan skor indeks Kampung membangun dengan bobot 30% (tiga puluh perseratus);
  - b. perubahan status Kampung indeks Kampung membangun dengan bobot 30% (tiga puluh perseratus);
  - c. status Kampung indeks Kampung membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh perseratus); dan
  - d. perbaikan jumlah penduduk miskin Kampung dengan bobot 30% (tiga puluh perseratus).

#### Pasal 8

Penetapan urutan kinerja Kampung dilakukan oleh Kementerian Keuangan berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial dan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 9

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk Kampung, angka kemiskinan Kampung, luas wilayah Kampung, dan tingkat kesulitan geografis Kampung di setiap kabupaten/kota.

#### Pasal 10

Penghitungan Alokasi Formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$AF \text{ Kampung} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} * AF \text{ Kabupaten.}$$

Keterangan :

AF Kampung = Alokasi Formula setiap Kampung.

PA,

- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Kampung terhadap total penduduk Kampung di Daerah.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Kabupaten terhadap total penduduk miskin Kampung di Daerah.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Kampung terhadap total luas wilayah Kampung di Daerah.
- Z4 = rasio IKG setiap Kampung terhadap IKG Kampung di Daerah.
- AF Kabupaten = Alokasi Formula Daerah.

#### Pasal 11

Indeks kesulitan geografis Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

#### Pasal 12

Bagian dana bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pemerintahan Kampung dan kondisi geografis.

#### Pasal 13

Penetapan Besaran Dana Kampung, Alokasi Dana Kampung, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah untuk setiap Kampung tahun anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### PENYALURAN DANA KAMPUNG

#### Pasal 14

- (1) Dana Kampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disalurkan dari RKUN ke RKK melalui RKUD, Dana Kampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disalurkan dari RKUD ke RKK melalui rekening pengeluaran kas Daerah.

*Pa*



- (2) Penyaluran Dana Kampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Kampung dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung ke RKK.
- (3) Pemotongan Dana Kampung dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung ke RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Kampung dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh perseratus);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juni dan paling lambat bulan Desember sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (5) Penyaluran Dana Kampung tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan setelah KPA penyalur DAK fisik dan Dana Kampung menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan :
  - a. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana kampung setiap Kampung; dan
  - b. peraturan Kampung mengenai APBKampung; dan c. surat kuasa pemindah bukuan Dana Kampung.
- (6) Penyaluran Dana Kampung tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan setelah KPA penyalur DAK fisik dan Dana Kampung menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan :
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya;
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari Dana Kampung tahap I yang telah disalurkan;

*Per*

- c. peraturan Kapitalaung mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kampung atau peraturan Kapitalaung mengenai penetapan terhadap keluarga penerima manfaat BLT Kampung; dan
  - d. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi komulatif sisa Dana Kampung di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari:
    - 1) sisa Dana Kampung tahun anggaran 2015 sampai tahun anggaran 2021 yang disetor oleh Kaur Keuangan ke RKK; dan
    - 2) sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2021.
- (7) Penyaluran Dana Kampung tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan setelah KPPN menerima :
- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung sampai tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Kampung tahap II yang telah disalurkan; dan
  - b. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Kampung tahun anggaran sebelumnya.
- (8) Capaian keluaran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- a. penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
  - b. dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a belum memenuhi kebutuhan *input* data, Kapitalaung dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.
  - c. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- d. dokumen persyaratan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen digital (*softcopy*).
  - e. dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d diolah dan dihasilkan OMSPAM.
- (9) Dalam hal Kampung tidak melaksanakan BLT Kampung tahun anggaran 2021 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) penyaluran Dana Kampung tahap II tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Kampung yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (10) Dalam hal Bupati melakukan perubahan peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung setiap Kampung, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan Bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung setiap Kampung.

#### BAB IV

#### PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG

##### Pasal 15

- (1) Prioritas penggunaan Dana Kampung disusun berdasarkan prinsip :
- a. kemanusiaan;
  - b. keadilan;
  - c. kebhinekaan;
  - d. keseimbangan alam; dan
  - e. kepentingan nasional.
- (2) Pengaturan prioritas penggunaan Dana Kampung tahun 2022 terdiri atas :
- a. prioritas penggunaan Dana Kampung;
  - b. penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung;
  - c. publikasi dan pelaporan; dan
  - d. pembinaan.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dan diurus oleh Kampung berdasarkan kewenangan Kampung.
- (4) Prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDG's Kampung melalui :

pa,

- a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Kampung;
- b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Kampung; dan
- c. adaptasi kebiasaan baru Kampung.

#### Pasal 16

- (1) Penggunaan Dana Kampung untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDG's Kampung:
  - a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Kampung/badan usaha milik Kampung bersama untuk pertumbuhan ekonomi Kampung merata;
  - b. penyediaan listrik Kampung untuk mewujudkan Kampung berenergi bersih dan terbarukan; dan
  - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Kampung/badan usaha milik Kampung bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Kampung sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Kampung untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDG's Kampung:
  - a. pendataan Kampung, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Kampung;
  - b. pengembangan Kampung wisata untuk pertumbuhan ekonomi Kampung merata;
  - c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Kampung untuk mewujudkan Kampung tanpa kelaparan; dan
  - d. Kampung inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Kampung, Kampung damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Kampung dinamis dan budaya Kampung adaptif.
- (3) Penggunaan Dana Kampung untuk adaptasi kebiasaan baru Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDG's Kampung:
  - a. mewujudkan Kampung sehat dan sejahtera melalui Kampung aman *Corona Virus Disease 2019*; dan
  - b. mewujudkan Kampung tanpa kemiskinan melalui BLT Dana Kampung.

*PA*

- (4) BLT Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Kapitalaung bertanggung jawab atas penggunaan Dana Kampung.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Kampung di setiap Kampung.

### BAB V

#### PUBLIKASI DAN PELAPORAN

##### Bagian Kesatu

##### Publikasi

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Kampung wajib mempublikasikan penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. hasil musyawarah Kampung;
  - b. data Kampung, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen rencana pembangunan jangka menengah Kampung, dokumen rencana kerja Pemerintah Kampung, prioritas penggunaan Dana Kampung, dan dokumen APBKampung; dan
  - c. publikasi APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

#### Pasal 19

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Kampung.
- (2) Publikasi penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (3) Dalam hal Pemerintah Kampung tidak mempublikasikan penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan permusyawaratan Kampung menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

Pa,

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 20

- (1) Kapitalaung menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung kepada Menteri melalui Kementerian.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah rencana kerja Pemerintah Kampung ditetapkan.

BAB VI  
KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. pa,

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 14 Maret 2022

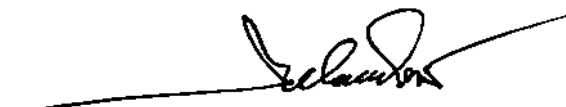
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

Diundangkan di Tahuna  
pada tanggal, 14 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,



MELANCHTON HARRY WOLFF

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
 NOMOR 5 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG  
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KECAMATAN	NAMA KAMPUNG	ALOKASI DANA KAMPUNG					TOTAL DANA KAMPUNG PER KAMPUNG
			APBN	ADK	BAGI HASIL PAJAK	BAGI HASIL RETRIBUSI	(8) = (4) + (5) + (6) + (7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Tabukan Utara	Kalasuge	707,475,000	442,268,879	7,595,663	3,325,458	1,160,665,000	
2	Tabukan Utara	Bahu	891,043,000	400,268,879	7,595,663	3,325,458	1,302,233,000	
3	Tabukan Utara	Mala	736,029,000	417,068,879	7,595,663	3,325,458	1,164,019,000	
4	Tabukan Utara	Kalekube	915,525,000	425,468,879	7,595,663	3,325,458	1,351,915,000	
5	Tabukan Utara	Naha	636,408,000	425,468,879	7,595,663	3,325,458	1,072,798,000	
6	Tabukan Utara	Beha	764,772,000	433,868,879	7,595,663	3,325,458	1,209,562,000	
7	Tabukan Utara	Utaurano	669,753,000	425,468,879	7,595,663	3,325,458	1,106,143,000	
8	Tabukan Utara	Lenganeng	641,214,000	375,068,879	7,595,663	3,325,458	1,027,204,000	
9	Tabukan Utara	Tarolang	897,915,000	375,068,879	7,595,663	3,325,458	1,283,905,000	
10	Tabukan Utara	Tola	916,699,000	349,868,879	7,595,663	3,325,458	1,277,489,000	
11	Tabukan Utara	Kaluraa	834,999,000	324,668,879	7,595,663	3,325,458	1,170,589,000	
12	Tabukan Utara	Bengketang	607,783,000	425,468,879	7,595,663	3,325,458	1,044,173,000	
13	Tabukan Utara	Petta	852,735,000	425,468,879	7,595,663	3,325,458	1,289,125,000	
14	Tabukan Utara	Bowongkulu	656,215,000	400,268,879	7,595,663	3,325,458	1,067,405,000	
15	Tabukan Utara	Pusunge	919,479,000	299,468,879	7,595,663	3,325,458	1,229,869,000	
16	Tabukan Utara	Moade	890,658,000	375,068,879	7,595,663	3,325,458	1,276,648,000	
17	Tabukan Utara	Raku	633,032,000	375,068,879	7,595,663	3,325,458	1,019,022,000	
18	Tabukan Utara	Petta Timur	691,901,000	400,268,879	7,595,663	3,325,458	1,103,091,000	
19	Tabukan Utara	Petta Barat	900,411,000	324,668,879	7,595,663	3,325,458	1,236,001,000	
20	Tabukan Utara	Petta Selatan	626,915,000	375,068,879	7,595,663	3,325,458	1,012,905,000	
21	Tabukan Utara	Likuang	689,413,000	492,668,879	7,595,663	3,325,458	1,193,003,000	
22	Tabukan Utara	Kalekube I	939,856,000	324,668,879	7,595,663	3,325,458	1,275,446,000	
23	Tabukan Utara	Bowongkulu I	615,311,000	324,668,879	7,595,663	3,325,458	950,901,000	
24	Tabukan Utara	Naha I	904,459,000	339,668,879	7,595,663	3,325,458	1,255,049,000	
25	Nusa Tabukan	Nanedakele	933,674,000	364,868,879	7,595,663	3,325,458	1,309,464,000	
26	Nusa Tabukan	Nusa	705,202,000	415,268,879	7,595,663	3,325,458	1,131,392,000	

NO	KECAMATAN	NAMA KAMPUNG	ALOKASI DANA KAMPUNG				TOTAL DANA KAMPUNG PER KAMPUNG
			APBN	ADK	BAGI HASIL PAJAK	BAGI HASIL RETRIBUSI	
27	Nusa Tabukan	Bukide	624,409,000	339,668,879	7,595,663	3,325,458	974,999,000
28	Nusa Tabukan	Bukide Timur	628,638,000	364,868,879	7,595,663	3,325,458	1,004,428,000
29	Nusa Tabukan	Nanusa	625,569,000	339,668,879	7,595,663	3,325,458	976,159,000
30	Manganitu Selatan	Kaluwatu	663,299,000	380,068,879	7,595,663	3,325,458	1,054,289,000
31	Manganitu Selatan	Laine	719,040,000	472,468,879	7,595,663	3,325,458	1,202,430,000
32	Manganitu Selatan	Lapango	979,245,000	371,668,879	7,595,663	3,325,458	1,361,835,000
33	Manganitu Selatan	Sowaeng	670,435,000	329,668,879	7,595,663	3,325,458	1,011,025,000
34	Manganitu Selatan	Ngalipaeng I	652,741,000	354,868,879	7,595,663	3,325,458	1,018,531,000
35	Manganitu Selatan	Ngalipaeng II	696,614,000	304,468,879	7,595,663	3,325,458	1,012,004,000
36	Manganitu Selatan	Batunderang	689,096,000	329,668,879	7,595,663	3,325,458	1,029,686,000
37	Manganitu Selatan	Bebalang	640,775,000	354,868,879	7,595,663	3,325,458	1,006,565,000
38	Manganitu Selatan	Mawira	648,954,000	304,468,879	7,595,663	3,325,458	964,344,000
39	Manganitu Selatan	Pindang	602,087,000	354,868,879	7,595,663	3,325,458	967,877,000
40	Manganitu Selatan	Lapepahe	868,523,000	329,668,879	7,595,663	3,325,458	1,209,113,000
41	Manganitu Selatan	Lehimi Tariang	757,798,000	304,468,879	7,595,663	3,325,458	1,073,188,000
42	Manganitu Selatan	Lapango I	727,908,000	354,868,879	7,595,663	3,325,458	1,093,698,000
43	Tatoareng	Kalama	695,215,000	440,468,879	7,595,663	3,325,458	1,146,605,000
44	Tatoareng	Kahakitang	658,869,000	364,868,879	7,595,663	3,325,458	1,034,659,000
45	Tatoareng	Mahengetang	719,637,000	339,668,879	7,595,663	3,325,458	1,070,227,000
46	Tatoareng	Para	672,852,000	364,868,879	7,595,663	3,325,458	1,048,642,000
47	Tatoareng	Dalako Bembanehe	678,628,000	415,268,879	7,595,663	3,325,458	1,104,818,000
48	Tatoareng	Taleko Batuasaiki	667,956,000	415,268,879	7,595,663	3,325,458	1,094,146,000
49	Tatoareng	Para I	619,866,000	314,468,879	7,595,663	3,325,458	945,256,000
50	Tamako	Nagha I	623,032,000	329,668,879	7,595,663	3,325,458	963,622,000
51	Tamako	Nagha II	692,353,000	380,068,879	7,595,663	3,325,458	1,083,343,000
52	Tamako	Pokol	869,581,000	329,668,879	7,595,663	3,325,458	1,210,171,000
53	Tamako	Balane	890,159,000	329,668,879	7,595,663	3,325,458	1,230,749,000
54	Tamako	Binala	657,938,000	329,668,879	7,595,663	3,325,458	998,528,000
55	Tamako	Ulung Peliang	665,778,000	354,868,879	7,595,663	3,325,458	1,031,568,000
56	Tamako	Menggawa	636,240,000	405,268,879	7,595,663	3,325,458	1,052,430,000
57	Tamako	Kalinda	650,958,000	354,868,879	7,595,663	3,325,458	1,016,748,000
58	Tamako	B e b u	647,154,000	329,668,879	7,595,663	3,325,458	987,744,000
59	Tamako	Makalekuhe	642,966,000	329,668,879	7,595,663	3,325,458	983,556,000
60	Tamako	Pananaru	640,522,000	380,068,879	7,595,663	3,325,458	1,031,512,000
61	Tamako	D a g h o	646,773,000	405,268,879	7,595,663	3,325,458	1,062,963,000



NO	KECAMATAN	NAMA KAMPUNG	ALOKASI DANA KAMPUNG					TOTAL DANA KAMPUNG PER KAMPUNG
			APBN	ADK	BAGI HASIL PAJAK	BAGI HASIL RETRIBUSI		
62	Tamako	Mahumu	674,258,000	329,668,879	7,595,663	3,325,458	1,014,848,000	
63	Tamako	Lelipang	592,834,000	329,668,879	7,595,663	3,325,458	933,424,000	
64	Tamako	Menggawa II	625,449,000	354,868,879	7,595,663	3,325,458	991,239,000	
65	Tamako	Kalama Darat	599,834,000	329,668,879	7,595,663	3,325,458	940,424,000	
66	Tamako	Kalinda I	580,929,000	329,668,879	7,595,663	3,325,458	921,519,000	
67	Tamako	Mahumu I	608,550,000	304,468,879	7,595,663	3,325,458	923,940,000	
68	Tamako	Mahumu II	639,861,000	329,668,879	7,595,663	3,325,458	980,451,000	
69	Tamako	Hesang	595,363,000	380,068,879	7,595,663	3,325,458	986,353,000	
70	Manganitu	Tawoali	876,913,000	324,668,879	7,595,663	3,325,458	1,212,503,000	
71	Manganitu	Barangka	657,815,000	375,068,879	7,595,663	3,325,458	1,043,805,000	
72	Manganitu	Nahepese	651,333,000	324,668,879	7,595,663	3,325,458	986,923,000	
73	Manganitu	Manumpitaeng	670,939,000	349,868,879	7,595,663	3,325,458	1,031,729,000	
74	Manganitu	Taloarane	673,318,000	349,868,879	7,595,663	3,325,458	1,034,108,000	
75	Manganitu	Mala	610,595,000	324,668,879	7,595,663	3,325,458	946,185,000	
76	Manganitu	Karatung I	658,833,000	324,668,879	7,595,663	3,325,458	994,423,000	
77	Manganitu	Karatung II	672,162,000	400,268,879	7,595,663	3,325,458	1,083,352,000	
78	Manganitu	Kauhis	676,547,000	375,068,879	7,595,663	3,325,458	1,062,537,000	
79	Manganitu	Sesiwung	688,054,000	375,068,879	7,595,663	3,325,458	1,074,044,000	
80	Manganitu	Lebo	760,340,000	366,668,879	7,595,663	3,325,458	1,137,930,000	
81	Manganitu	Barangkalang	913,344,000	375,068,879	7,595,663	3,325,458	1,299,334,000	
82	Manganitu	Belengang	715,385,000	375,068,879	7,595,663	3,325,458	1,101,375,000	
83	Manganitu	Bakalaeng	627,426,000	324,668,879	7,595,663	3,325,458	963,016,000	
84	Manganitu	Hiung	684,844,000	324,668,879	7,595,663	3,325,458	1,020,434,000	
85	Manganitu	Pinebentengang	709,852,000	324,668,879	7,595,663	3,325,458	1,045,442,000	
86	Manganitu	Taloarane I	648,632,000	324,668,879	7,595,663	3,325,458	984,222,000	
87	Manganitu	Bengka	585,348,000	299,468,879	7,595,663	3,325,458	895,738,000	
88	Tabukan Tengah	Bowongkali	671,410,000	349,868,879	7,595,663	3,325,458	1,032,200,000	
89	Tabukan Tengah	Kulur I	687,361,000	349,868,879	7,595,663	3,325,458	1,048,151,000	
90	Tabukan Tengah	Kulur II	697,820,000	375,068,879	7,595,663	3,325,458	1,083,810,000	
91	Tabukan Tengah	Bira	953,225,000	324,668,879	7,595,663	3,325,458	1,288,815,000	
92	Tabukan Tengah	Kuma	634,206,000	375,068,879	7,595,663	3,325,458	1,020,196,000	
93	Tabukan Tengah	Bungalawang	656,111,000	400,268,879	7,595,663	3,325,458	1,067,301,000	
94	Tabukan Tengah	Miulu	667,546,000	349,868,879	7,595,663	3,325,458	1,028,336,000	
95	Tabukan Tengah	Gunung	644,759,000	349,868,879	7,595,663	3,325,458	1,005,549,000	
96	Tabukan Tengah	Talengen	684,641,000	349,868,879	7,595,663	3,325,458	1,045,431,000	

NO	KECAMATAN	NAMA KAMPUNG	ALOKASI DANA KAMPUNG				TOTAL DANA KAMPUNG PER KAMPUNG
			APBN	ADK	BAGI HASIL PAJAK	BAGI HASIL RETRIBUSI	
97	Tabukan Tengah	Biru	667,985,000	349,868,879	7,595,663	3,325,458	1,028,775,000
98	Tabukan Tengah	Tariang Baru	642,579,000	324,668,879	7,595,663	3,325,458	978,169,000
99	Tabukan Tengah	Sensong	646,678,000	324,668,879	7,595,663	3,325,458	982,268,000
100	Tabukan Tengah	Rendingan	682,779,000	349,868,879	7,595,663	3,325,458	1,043,569,000
101	Tabukan Tengah	Palahanaeng	642,310,000	299,468,879	7,595,663	3,325,458	952,700,000
102	Tabukan Tengah	Timbelang	645,418,000	324,668,879	7,595,663	3,325,458	981,008,000
103	Tabukan Tengah	Pelelangen	645,741,000	299,468,879	7,595,663	3,325,458	956,131,000
104	Tabukan Tengah	Malueng	616,303,000	299,468,879	7,595,663	3,325,458	926,693,000
105	Tabukan Tengah	Kuma I	815,871,000	324,668,879	7,595,663	3,325,458	1,151,461,000
106	Tabukan Selatan	Simueng	672,748,000	329,668,879	7,595,663	3,325,458	1,013,338,000
107	Tabukan Selatan	Bentung	627,647,000	380,068,879	7,595,663	3,325,458	1,018,637,000
108	Tabukan Selatan	Lesabe	697,524,000	405,268,879	7,595,663	3,325,458	1,113,714,000
109	Tabukan Selatan	Malamenggu	684,223,000	329,668,879	7,595,663	3,325,458	1,024,813,000
110	Tabukan Selatan	Palareng	686,796,000	329,668,879	7,595,663	3,325,458	1,027,386,000
111	Tabukan Selatan	Binebas	697,979,000	329,668,879	7,595,663	3,325,458	1,038,569,000
112	Tabukan Selatan	Mandoi	578,317,000	329,668,879	7,595,663	3,325,458	918,907,000
113	Tabukan Selatan	Batuwinkung	670,773,000	329,668,879	7,595,663	3,325,458	1,011,363,000
114	Tabukan Selatan	Birahi	627,041,000	329,668,879	7,595,663	3,325,458	967,631,000
115	Tabukan Selatan	Laotongan	730,122,000	329,668,879	7,595,663	3,325,458	1,070,712,000
116	Tabukan Selatan	Bukide	670,484,000	329,668,879	7,595,663	3,325,458	1,011,074,000
117	Tabukan Selatan	Kalagheng	640,508,000	329,668,879	7,595,663	3,325,458	981,098,000
118	Tabukan Selatan	Lesabe I	673,555,000	329,668,879	7,595,663	3,325,458	1,014,145,000
119	Tabukan Selatan	Bulo	633,281,000	304,468,879	7,595,663	3,325,458	948,671,000
120	Kendahe	Kendahe I	844,010,000	349,868,879	7,595,663	3,325,458	1,204,800,000
121	Kendahe	Kendahe II	919,605,000	349,868,879	7,595,663	3,325,458	1,280,395,000
122	Kendahe	Talawid	676,815,000	375,068,879	7,595,663	3,325,458	1,062,805,000
123	Kendahe	Tariang Lama	641,701,000	375,068,879	7,595,663	3,325,458	1,027,691,000
124	Kendahe	Pempalraeng	694,015,000	349,868,879	7,595,663	3,325,458	1,054,805,000
125	Kendahe	Mohong Sawang	631,812,000	375,068,879	7,595,663	3,325,458	1,017,802,000
126	Kendahe	Lipang	644,840,000	324,668,879	7,595,663	3,325,458	980,430,000
127	Kendahe	Kawaluso	785,267,000	349,868,879	7,595,663	3,325,458	1,146,057,000
128	Tabukan Selatan Tengah	Hangke	637,563,000	329,668,879	7,595,663	3,325,458	978,153,000
129	Tabukan Selatan Tengah	Salurang	621,209,000	380,068,879	7,595,663	3,325,458	1,012,199,000
130	Tabukan Selatan Tengah	Tambung	652,922,000	329,668,879	7,595,663	3,325,458	993,512,000
131	Tabukan Selatan Tengah	Beeng	669,931,000	329,668,879	7,595,663	3,325,458	1,010,521,000

NO	KECAMATAN	NAMA KAMPUNG	ALOKASI DANA KAMPUNG				TOTAL DANA KAMPUNG PER KAMPUNG
			APBN	ADK	BAGI HASIL PAJAK	BAGI HASIL RETRIBUSI	
132	Tabukan Selatan Tengah	Lehupu	631,347,000	329,668,879	7,595,663	3,325,458	971,937,000
133	Tabukan Selatan Tengah	Bowone	611,681,000	329,668,879	7,595,663	3,325,458	952,271,000
134	Tabukan Selatan Tengah	Beeng Laut	681,331,000	304,468,879	7,595,663	3,325,458	996,721,000
135	Tabukan Selatan Tengah	Tenda	605,089,000	329,668,879	7,595,663	3,325,458	945,679,000
136	Tabukan Selatan Tengah	Aha Patung	597,491,000	329,668,879	7,595,663	3,325,458	938,081,000
137	Tabukan Selatan Tenggara	Pintareng	656,485,000	430,468,879	7,595,663	3,325,458	1,097,875,000
138	Tabukan Selatan Tenggara	Basauh	643,018,000	354,868,879	7,595,663	3,325,458	1,008,808,000
139	Tabukan Selatan Tenggara	Tumalede	630,277,000	329,668,879	7,595,663	3,325,458	970,867,000
140	Tabukan Selatan Tenggara	Sampakang	633,172,000	304,468,879	7,595,663	3,325,458	948,562,000
141	Tabukan Selatan Tenggara	Dalokaweng	678,666,000	329,668,879	7,595,663	3,325,458	1,019,256,000
142	Tabukan Selatan Tenggara	Malisade	621,133,000	329,668,879	7,595,663	3,325,458	961,723,000
143	Kepulauan Marore	Marore	688,730,000	339,668,879	7,595,663	3,325,458	1,039,320,000
144	Kepulauan Marore	Kawio	654,930,000	339,668,879	7,595,663	3,325,458	1,005,520,000
145	Kepulauan Marore	Matutuang	705,355,000	314,470,411	7,595,663	3,325,458	1,030,746,532
	TOTAL		100,801,378,000	51,238,988,987	1,101,371,135	482,191,410	153,623,929,532

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


  
JABES EZAR GAGHANA